

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015-2019

Jakarta, 20 November 2015



Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri | Kemdikbud

Topik

1. Siklus Perencanaan & Penganggaran Pendidikan
2. Pembangunan Pendidikan & Kebudayaan
3. Mekanisme Perencanaan & Penganggaran
4. Rencana Strategis Pendidikan & Kebudayaan
5. Nawacita
6. Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
7. Evaluasi Kinerja

1

Siklus Perencanaan & Penganggaran Pendidikan

Definisi [1 / 2]

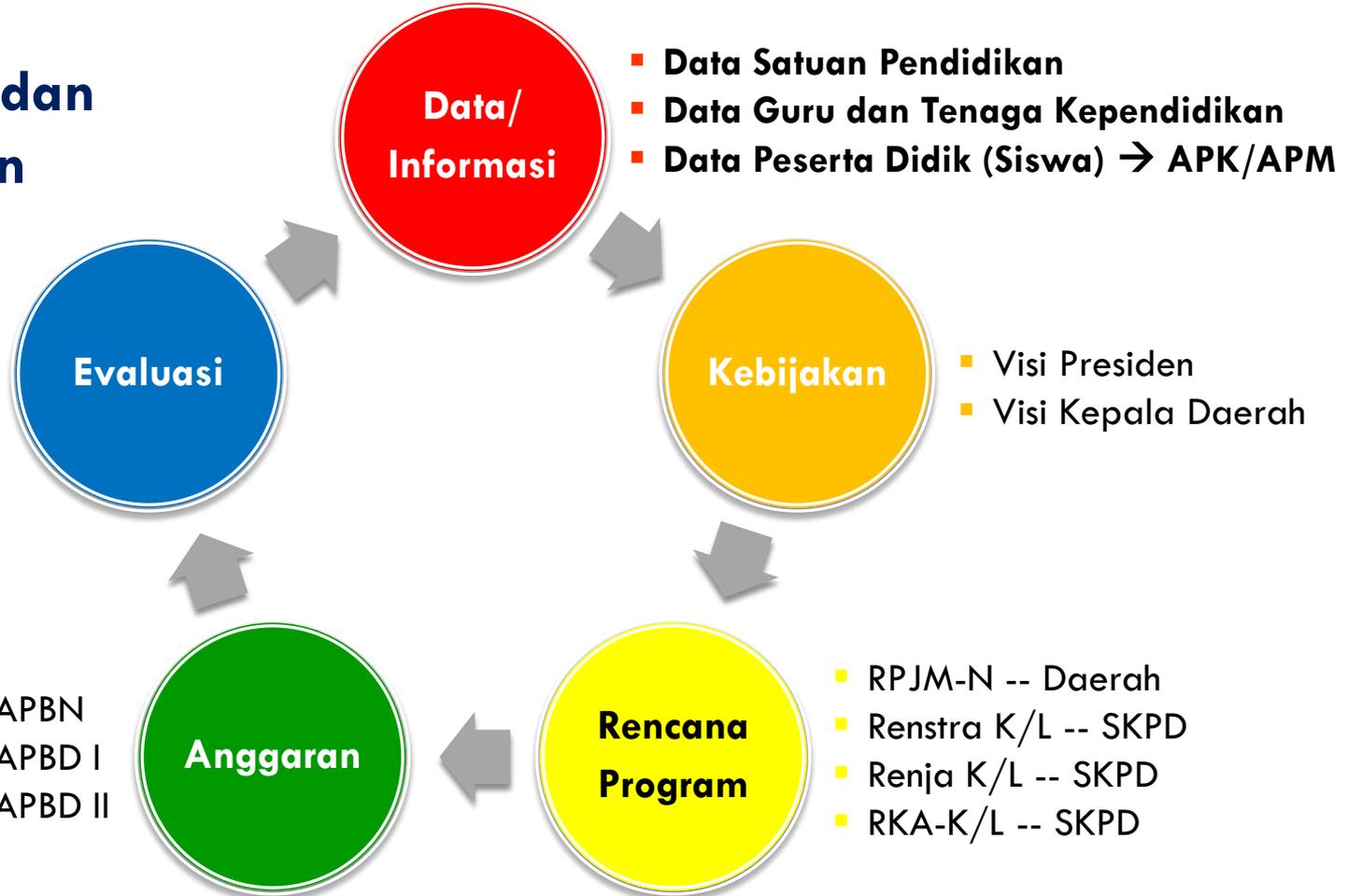
- **data**/*da·ta*/ *n* **1** keterangan yang benar dan nyata; **2** keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).
- **informasi**/*in·for·ma·si*/ *n* **1** penerangan; **2** pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; **3** *Ling* keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu.
- **kebijakan**/*ke·bi·jak·an*/ *n* **1** kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; **2** rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Definisi [2/2]

- **perencanaan**/*pe·ren·ca·na·an*/ *n* proses, cara, perbuatan merencanakan (merancang).
- **program**/*prog·ram*/ *n* **1** rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan; **2** *Komp* urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu.
- **anggaran**/*ang·gar·an*/ *n* **1** perkiraan; perhitungan; **2** aturan; **3** *Ek* taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang; **4** *Man* rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang.
- **evaluasi**/*eva·lu·a·si*/ /*évaluation*/ *n* penilaian.

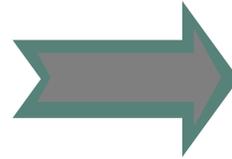
Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pendidikan

- LAKIP
- LHP Keuangan





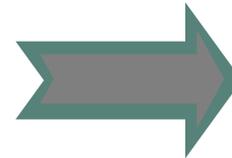
**Evaluasi
kegiatan
TA 2015**



**Perbaikan
Kegiatan
TA 2016**

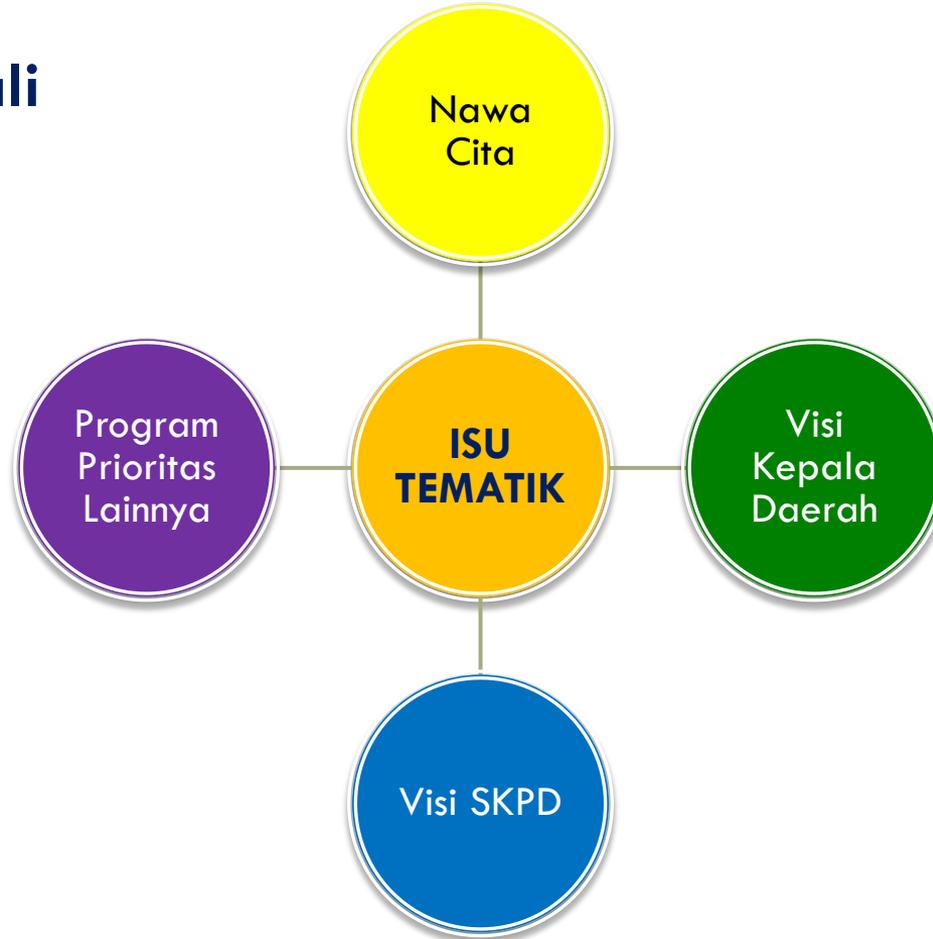
**Kegiatan Berhenti
di TA 2015**

**Kegiatan Baru
di TA 2016**



**Isu Tematik
yang Bisa Menjadi
Perhatian Bersama**

**Isu Tematik
sebagai Kendali
Program dan
Kegiatan K/L
maupun SKPD**



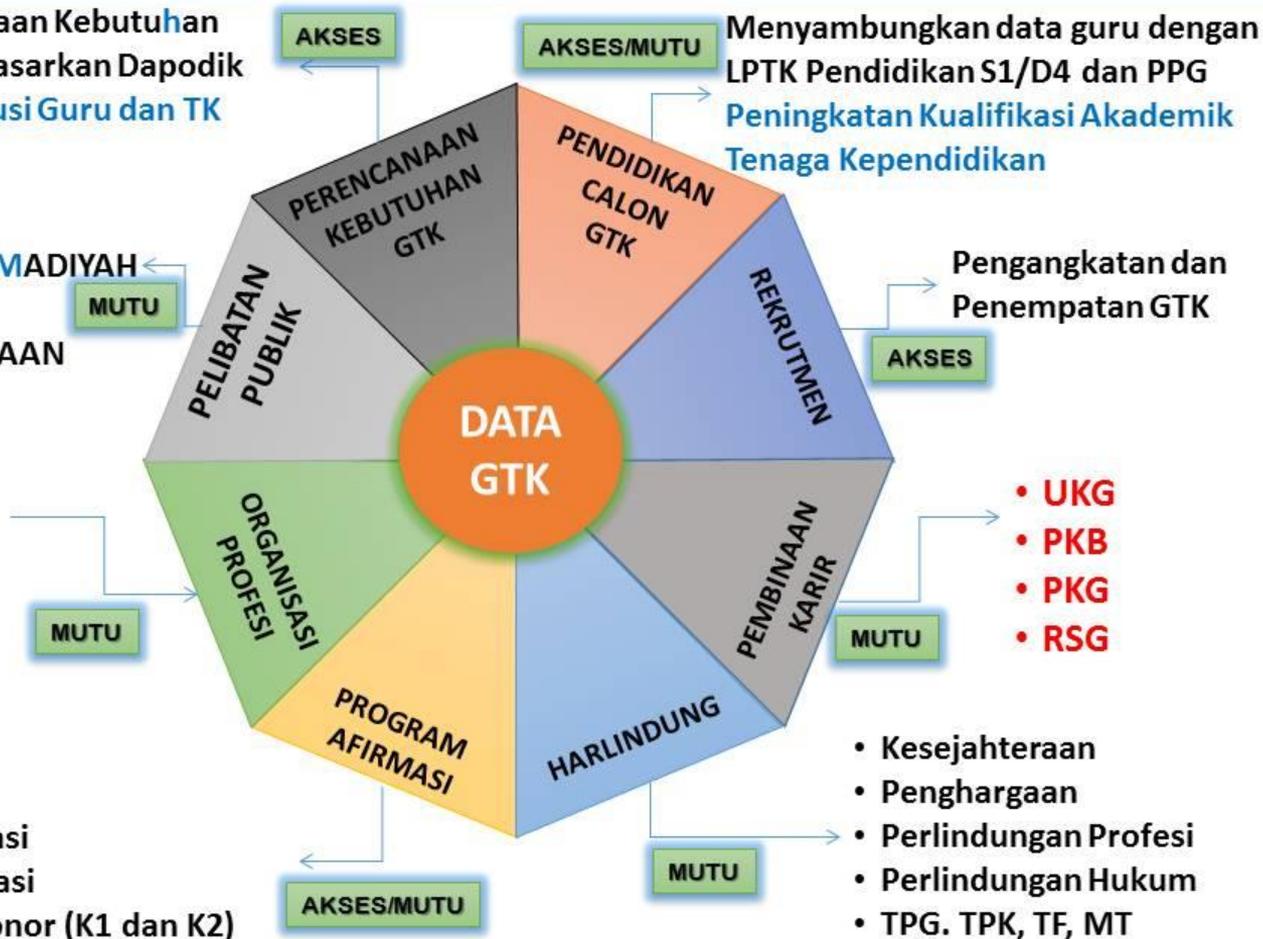
Entitas Desain Tata Kelola GTK

Perencanaan Kebutuhan
GTK Berdasarkan Dapodik
Redistribusi Guru dan TK

- DUDI
- ASOSIASI
- MUHAMMADIYAH
- NU
- KEAGAMAAN
- LSM

- PGRI
- IGI
- FGII
- FGSJ
- MGBK
- AGTINAS
- IGBJ
- IGTK
- AGMI
- AGEI
- AGFI, dsb

- GGD
- Sertifikasi
- Kualifikasi
- Guru Honor (K1 dan K2)



2

Pembangunan Pendidikan & Kebudayaan

Tema Pembangunan Pendidikan 2005-2025



TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN			
2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024
Peningkatan Kapasitas & Modernisasi	Penguatan Pelayanan	Daya Saing Regional	Daya Saing Internasional

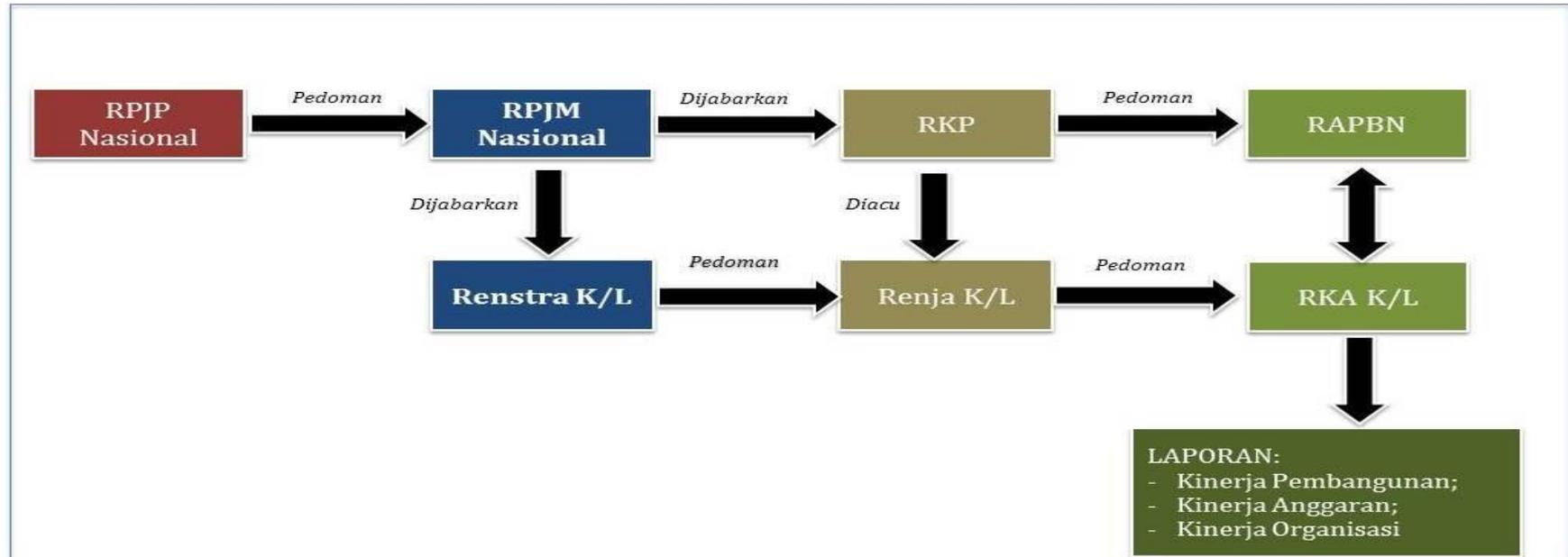
Pilar Pembangunan Kebudayaan



3

Mekanisme Perencanaan & Penganggaran

Alur Keterkaitan RPJPN & RPJMN dengan Renstra K/L



Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra K/L memiliki posisi yang sangat strategis, di mana:

- Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN.
- Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja K/L.

Proses Penyusunan Renstra

1. PROSES TEKNOKRATIK

Dilakukan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan beberapa skenario pembangunan)

Rancangan Teknokratik Renstra K/L 2015-2019 berpedoman pada:

- Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2015-2019;
- Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya
- Aspirasi masyarakat.

2. PROSES POLITIK

(Rancangan Awal RPJMN memuat platform Presiden terpilih)

Rancangan Renstra K/L berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN

- Namun masih dapat mengusulkan rincian kebijakan yang berbeda dengan Rancangan Awal RPJM Nasional sejauh tetap dalam koridor untuk melaksanakan platform Presiden terpilih (dalam bentuk Prioritas Nasional)

Bahan masukan Rancangan Renstra K/L:

- Rancangan teknokratik Renstra K/L (mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah)

Rancangan Renstra K/L ditelaah oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

3. PROSES PENETAPAN

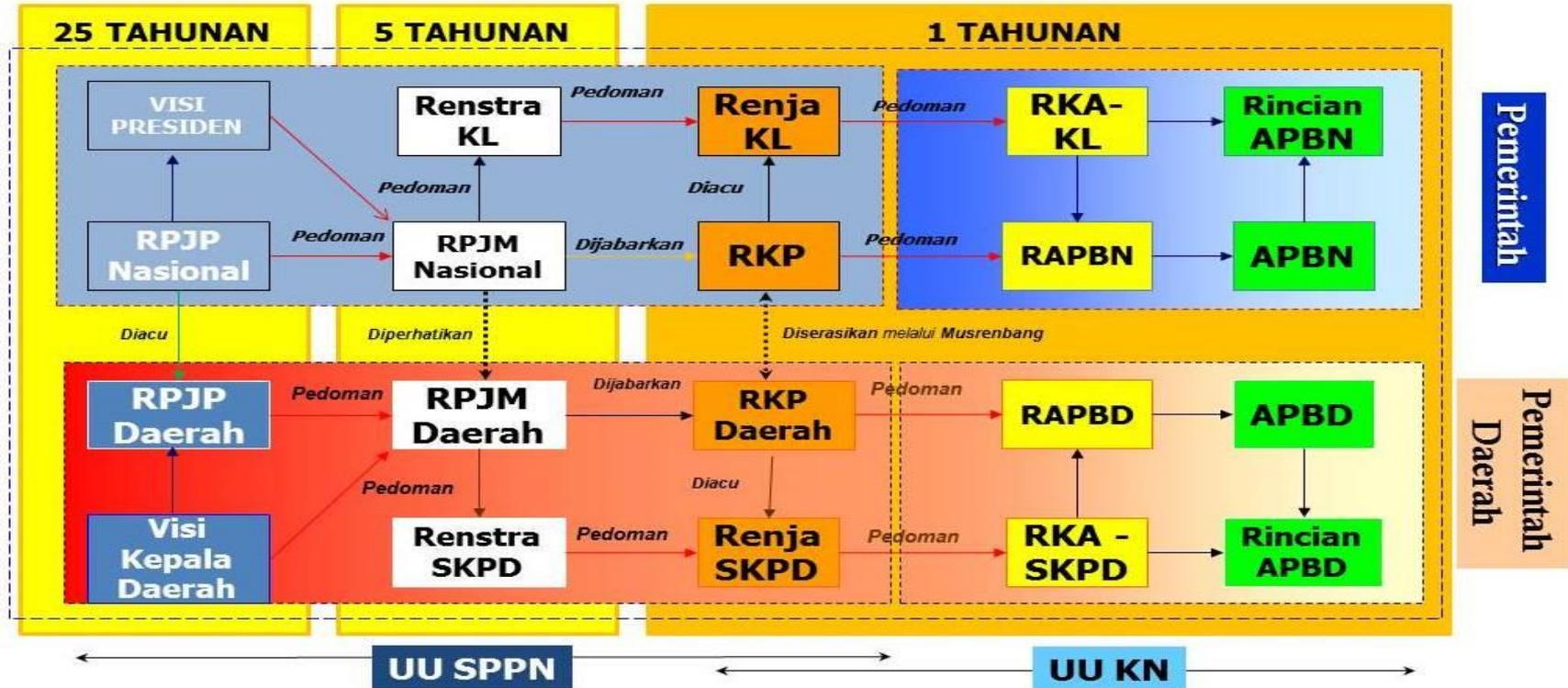
(RPJMN ditetapkan melalui Peraturan Presiden)

Renstra K/L disesuaikan dengan RPJMN

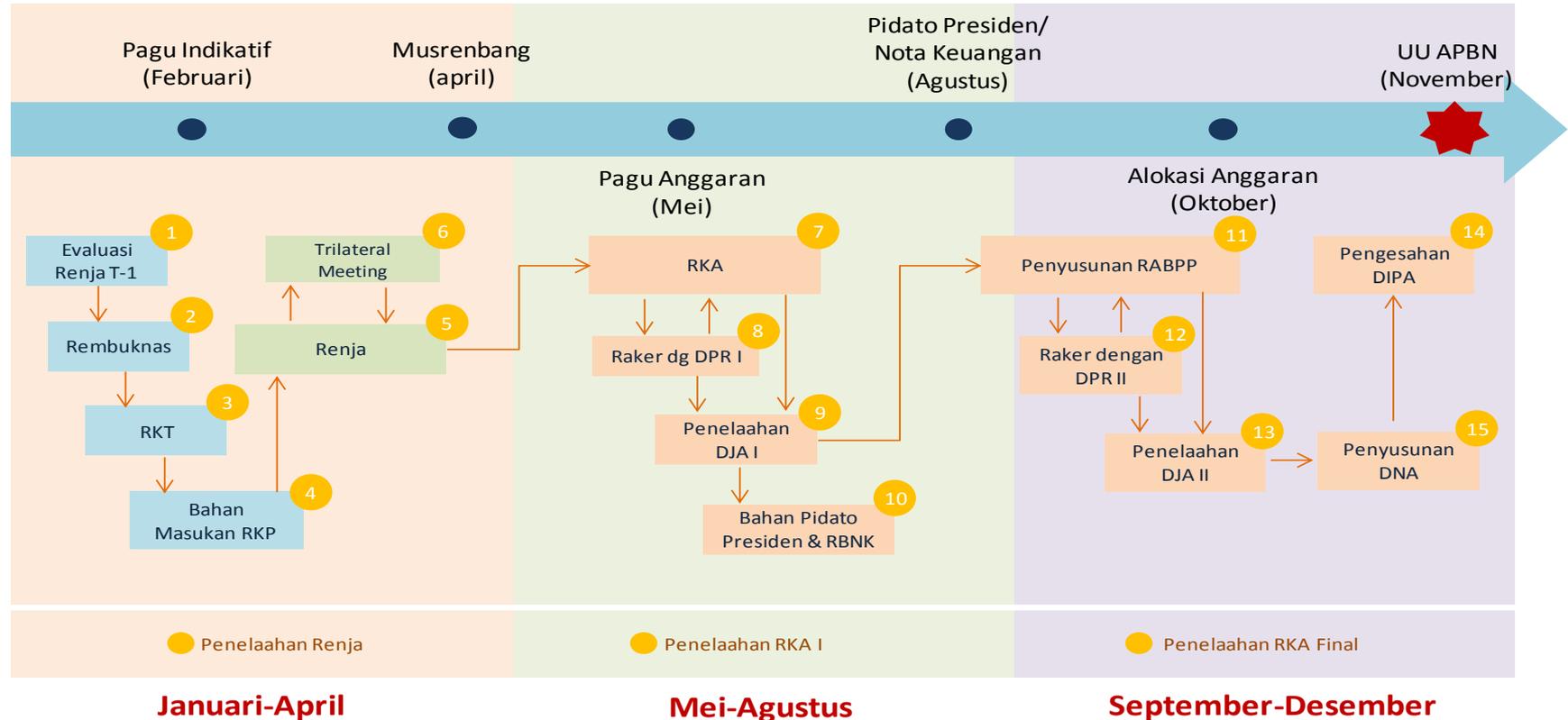
Renstra K/L ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L, untuk disampaikan kepada:

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Keuangan, dan
- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Keterkaitan Perencanaan Strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran



4 Rencana Strategis Pendidikan & Kebudayaan

Landasan Hukum Penyusunan Renstra [1 / 2]

- a. UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Pasal 6 ayat (1): Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
 - Pasal 15 ayat (1): Pimpinan K/L menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN
- c. UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 17 Tahun 2007
- d. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015—2019
- f. Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Landasan Hukum Penyusunan Renstra [2/2]

- g. Kepres No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019
- h. Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan penelaahan Renstra K/L 2015-2019
- i. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
 - Pasal 4 ayat (4): Unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian
 - Pasal 4 ayat (5): Unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon I
- m. Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang OTK Kemendikbud

Paradigma Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pendidikan untuk Semua
2. Pendidikan Sepanjang Hayat
3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan
4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar
5. Pendidikan Membentuk Karakter
6. Sekolah yang Menyenangkan
7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Permasalahan Pembangunan Dikbud [1 / 2]

1. Peran pelaku pembangunan pendidikan belumlah optimal
2. Peran pelaku budaya masih belum besar dalam melestarikan kebudayaan
3. Belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas
4. Pelaksanaan wajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas belum maksimal
5. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal
6. Peningkatan manajemen guru dan pendidikan keguruan/tendik blm maksimal
7. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan Dikmas belum maksimal
8. Pengentasan keniraksaraan belum merata
9. Peningkatan pendidikan keluarga belum seperti yang diharapkan

Permasalahan Pembangunan Dikbud [2/2]

10. Rendahnya mutu kemahiran membaca dan semakin punahnya penggunaan bahasa dan sastra daerah
11. Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa
12. Minimnya apresiasi seni dan kreativitas karya budaya
13. Pelestarian warisan budaya belum efektif
14. Belum optimalnya promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya
15. Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal
16. Pemanfaatan anggaran pendidikan belum efektif dan efisien
17. Belum optimalnya tata kelola organisasi Kemendikbud

Visi Kemendikbud 2015-2019

VISI

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong

Makna Visi:

Tujuh Elemen Ekosistem Pendidikan [1 / 2]

1. Sekolah yang kondusif

- a. Tempat menyenangkan bagi pelaku pendidikan untuk berinteraksi
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

2. Guru sebagai penyemangat

- a. Mempunyai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian)
- b. Mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif

3. Orangtua yang terlibat aktif

- a. Membentuk kepribadian anak, mendidik anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah
- b. Memiliki hak dan kewajiban memilih sekolah, memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya

4. Masyarakat yang sangat peduli

- a. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.
- b. Partisipasi masy dapat berupa materi, tenaga dan pikiran, baik akademis maupun non akademis

Makna Visi:

Tujuh Elemen Ekosistem Pendidikan [2/2]

5. Industri yang berperan penting

- a. Berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa
- b. Memecahkan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja
- c. DUDI sebagai tempat praktik, magang, belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa

6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar

- a. Memberi masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan
- b. Komunikasi dan aspirasi serta interaksi kedua belah pihak untuk mempercepat pembangunan Dikbud

7. Pemerintah yang berperan optimal: dukungan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% APBN serta APBD

Makna Visi:

Tujuh Elemen Ekosistem Kebudayaan [1 / 2]

1. Terwujudnya pemahaman pluralitas sosbud dalam masyarakat (membangun harmoni sosial, toleransi, dan kesatuan dalam keanekaragaman)
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah (nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air)
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, inovasi, produksi serta pengembangan ilmu dasar dan terapan sesuai DUDI/keunggulan lokal)
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*)

Makna Visi:

Tujuh Elemen Ekosistem Kebudayaan [2/2]

5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia
6. Tingginya apresiasi keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional lebih banyak
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya

Makna Visi:

Berlandaskan Gotong Royong

1. Gotong royong sebagai kepribadian dan budaya bangsa yg telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat
2. Gotong royong dalam pembangunan Dikbud berarti dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong
3. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan Dikbud sebagai sebuah “**gerakan**”
4. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah

Misi Kemendikbud 2015-2019

MISI

- 1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat**
- 2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan**
- 3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu**
- 4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa**
- 5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik**

Makna Misi [1 / 2]

- 1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat** adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian
- 2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan** adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)
- 3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu** adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi

Makna Misi [2/2]

4. **Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa** adalah:
 - a. menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa;
 - b. membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;
 - c. meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri;
 - d. melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. **Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik** adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien

Makna Misi:

Sebagai Bagian dari Revolusi Mental

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif

5

Nawacita

Nawacita

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*

- Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun

Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:

	<i>REALISASI FISIK</i>	<i>REALISASI ANGGARAN</i>	<i>ALOKASI ANGGARAN</i>
17,9 Juta siswa menerima KIP	<i>(12,06 juta)</i>	<i>(7,3 T)</i>	<i>(Rp.9,78T)</i>
13,4 Juta siswa SMA/SMK menerima BOS	<i>(11,98 Juta)</i>	<i>(Rp.9,87T)</i>	<i>(Rp.10,6 T)</i>
10.493 Ruang Kelas Baru dibangun	<i>(9.776 Ruang)</i>	<i>(Rp.1,31T)</i>	<i>(Rp.1,8 T)</i>
850 Unit SD-SMP Satu Atap dibangun	<i>(580 unit)</i>	<i>(Rp.53,4 M)</i>	<i>(Rp.93,6 M)</i>
256 Unit Sekolah Baru dibangun	<i>(218 unit)</i>	<i>(Rp431,4 M)</i>	<i>(Rp.764,5 M)</i>
74.878 Lembaga PAUD Baru diberi bantuan	<i>(71.471 lembaga)</i>	<i>(Rp.534,6 M)</i>	<i>(Rp.540,4M)</i>

Nawacita

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*

- Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun

Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:	REALISASI FISIK:	REALISASI ANGGARAN:	ALOKASI ANGGARAN:
13.338 Ruang kelas direhabilitasi	(11.644 Ruang)	(Rp.821 M)	(Rp.1,4 T)
1.321 Laboratorium dibangun	(1.095 Laboratorium)	(Rp.304 M)	(Rp.410,1M)
2.269 Perpustakaan dibangun	2.195 Perpustakaan	(Rp404,1 M)	(Rp.428,1 M)
72.212 Guru disertifikasi	(24.538 Guru)	(Rp.81,2 M)	(Rp.175,7 M)
47.362 Guru ditingkatkan kompetensinya	(9.828 Guru)	(Rp.18,5M)	(Rp.336,8 M)
32.176 Sekolah diakreditasi	(23.692 Sekolah)	(Rp.101,9 M)	(Rp.159,97 M)

Nawacita

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional*

- Membangun sejumlah *science and technopark* di kawasan politeknik dan **SMK-SMK** dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:

SMK Pariwisata

Realisasi Fisik

320 Ruang Kelas Baru dibangun	27 Ruang
9 Unit Sekolah Baru dibangun**	0 Unit***
35 Ruang Praktik Siswa dibangun	0 ruang***
45 Perpustakaan dibangun	0 ruang***
4 Unit <i>Teaching Factory</i> dibangun	0 Unit***

SMK Kelautan

Realisasi Fisik

200 Ruang Kelas Baru dibangun	81 Ruang
10 Unit Sekolah Baru dibangun**	5 Unit
75 Ruang Praktik Siswa dibangun	8 Ruang
30 Perpustakaan dibangun	0 ruang***
4 Unit <i>Teaching Factory</i> dibangun	0 Unit***

* Termasuk Kebijakan Umum 2.3

** Pembangunan 1 Unit SMK Baru = Rp± 20 M (termasuk peralatan)

*** dalam proses verifikasi

Nawacita

8

Melakukan revolusi karakter bangsa

- Membangun pendidikan kewarganegaraan.
- Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.
- Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.

Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:

2.227 Kurikulum disempurnakan

<i>REALISASI FISIK:</i>	<i>REALISASI ANGGARAN:</i>	<i>ALOKASI ANGGARAN:</i>
<i>(1.001 dokumen)</i>	<i>(Rp.35,6 M)</i>	<i>(Rp.100,9 M)</i>

Ujian Nasional diperbaiki:

- **540 sat pendidikan** yang menerapkan CAT *(556 Satuan pend)* *(Rp.5,6 M)* *(Rp.14,4 M)*
- **7,4 juta peserta didik** formal dan non formal yg dinilai kompetensinya sesuai SNP *(7,39 peserta)* *(Rp.482 M)* *(Rp.558 M)*

69.634 Guru Non PNS Dikmen diberi Tunjangan Profesi

(62.892 Guru) *(Rp.1,2 T)* *(Rp.1,9 T)*

52.375 Guru Dikdas diberi Tunjangan Khusus

(38.331 Guru) *(Rp.306,4 M)* *(Rp.921 M)*

13.143 Guru Non-PNS Dikmen diberi Tunjangan Fungsional

(10.627 Guru) *(Rp.28,7 M)* *(Rp.69,8 M)*

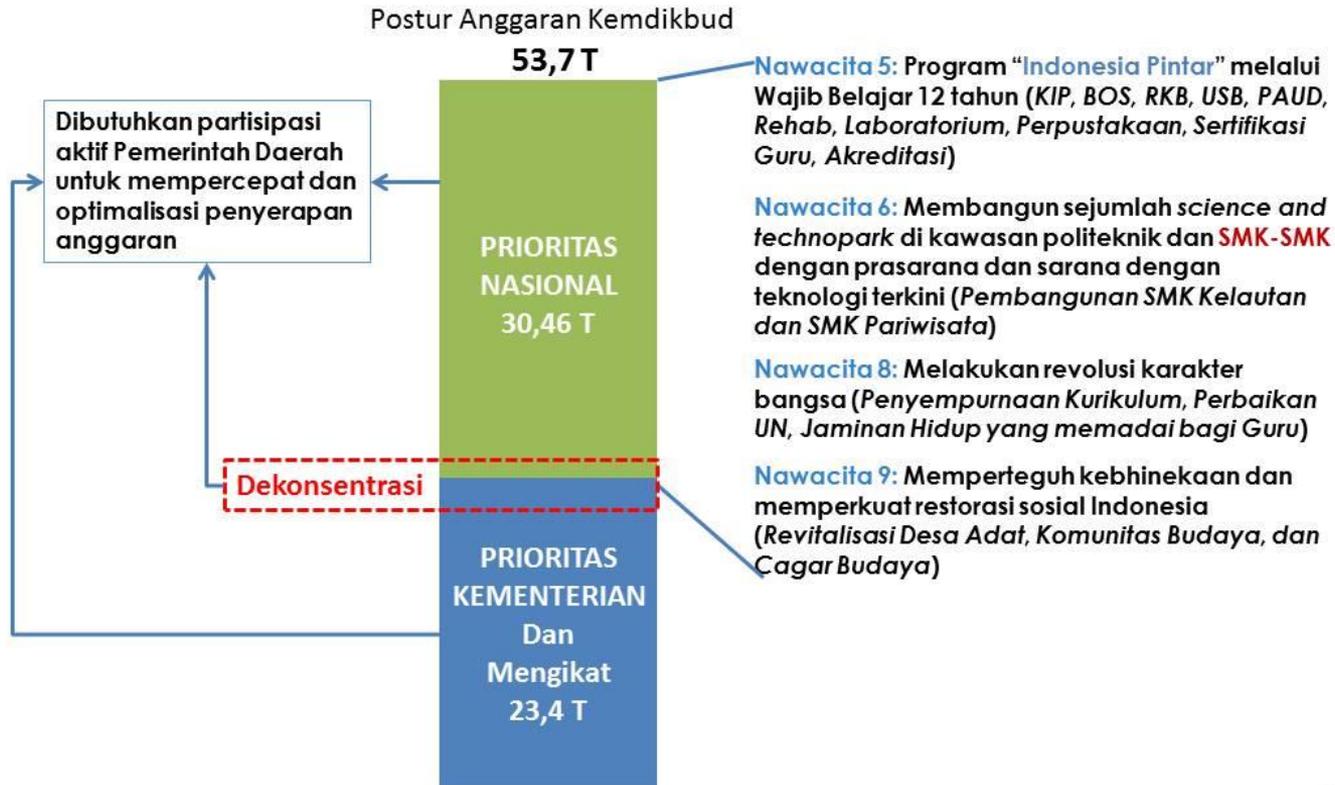
Nawacita

9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia*

- Memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
- Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.
- Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:		REALISASI FISIK	REALISASI ANGGARAN:	ALOKASI ANGGARAN:
498 Desa Adat, Komunitas Budaya, dan Cagar Budaya direvitalisasi		2	12,7 M	141,9 M
2.030 Cagar Budaya diregistrasi	12.973 cagar budaya		2,9 M	8,7 M
35 Museum dibangun/direvitalisasi	0 museum		42,5 M	136,7 M
10 Rumah Budaya dibangun/dirintis di Luar Negeri	4 rmh budaya		62,8 M	104,5 M
Pembuatan dan pemutaran Film untuk Pendidikan Karakter melalui bioskop (termasuk bioskop keliling):				
<input type="checkbox"/> 13 Doc Perfilman yang difasilitasi	0 dokumen	233,9 juta	234,9 juta	
<input type="checkbox"/> Persemaian Nilai Budaya sebagai penguat karakter bangsa pada 25 kab/kota	19 Kab/kota	10,7 M	14,1 M	

Partisipasi Aktif Pemerintah Daerah dibutuhkan untuk mempercepat penyerapan anggaran



6

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program [1/4]

KODE	Sasaran Program (Outcome)/IKP	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA						
SP.1.1	Terselenggaranya sistem Perencanaan yang andal					
IKP.1.1.1	Persentase sasaran Renstra dan RKA tahunan yang dipenuhi oleh satuan kerja Kemendikbud	84%	88%	92%	96%	100%
IKP.1.1.2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan dikbud di luar negeri terhadap layanan Atdik/DEWATAP UNESCO dan SLN	92%	94%	96%	98%	100%
IKP.1.1.3	Persentase tindak lanjut kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Dikbud	78%	81%	84%	87%	90%
SP.1.2	Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel					
IKP.1.2.1	Opini BPK terhadap LK Kemendikbud	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SP.1.3	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)					
IKP.1.3.1	Persentase Pegawai yang melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kompetensi	47%	56%	66%	77%	85%

Sasaran Program [2/4]

KODE	Sasaran Program (Outcome)/IKP	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
SP.1.4	Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan perpu, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tatalaksana yang efektif					
IKP.1.4.1	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibutuhkan	150	160	170	180	190
IKP.1.4.2	Jumlah masalah hukum (litigasi dan nonlitigasi) yang diselesaikan	50	60	70	80	85
IKP.1.4.3	Jumlah unit organisasi yang melakukan penataan organisasi	140	140	140	140	140
IKP.1.4.4	Jumlah unit organisasi yang menerapkan tata laksana yang efektif	140	140	140	140	140
IKP.1.4.5	Jumlah Jabatan di lingkungan Kemendikbud yang telah di analisis dan diukur beban kerjanya.	425	425	425	425	425
SP.1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan					
IKP.1.5.1	Persentase pengembangan, pembinaan, dan Pendayagunaan TIK untuk pendidikan	52,1%	56,6%	61,4%	66,7%	70,6%
IKP.1.5.2	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000
IKP.1.5.3	Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran	65.811	76.558	87.305	98.053	108.800
IKP.1.5.4	Presentase E-Layanan Kementerian yang sesuai dengan tata kelola TIK	40%	60%	80%	100%	100%

Sasaran Program [3/4]

KODE	Sasaran Program (Outcome)/IKP	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
SP.1.6	Meningkatnya akses layanan Pendidikan antar negara ASEAN					
IKP.1.6.1	Persentase fasilitasi pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan SEAMEO	67,1%	74,2%	81,3%	88,4%	96,5%
IKP.1.6.2	Persentase peningkatan akses layanan pendidikan antar negara ASEAN	58,3%	66,6%	74,9%	83,2%	91,5%
SP.1.7	Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan					
IKP.1.7.1	Persentase tingkat validasi data bidang pendidikan dan kebudayaan	80%	85%	90%	95%	100%
IKP.1.7.2	Persentase penyebaran hasil pendayagunaan data dan statistik	75%	80%	85%	90%	95%
IKP.1.7.3	Persentase terintegrasinya pendataan pusat dan daerah	20%	40%	60%	80%	100%
SP.1.8	Meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan Layanan masyarakat					
IKP.1.8.1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	73	74	75	76	77
IKP.1.8.2	Persentase pengaduan masyarakat yang direspon secara cepat dan efektif	50%	65%	80%	90%	100%

Sasaran Program [4/4]

KODE	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
SP.1.9	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film Indonesia					
IKP.1.9.1	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	83,00%	86,00%	89,00%	92,00%	95,00%
SP1.10	Meningkatnya kualitas pengembangan perfilman					
IKP.1.10.1	Persentase meningkatnya kualitas film dan iklan sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%
IKP.1.10.2	Presentase perizinan dan peredaran film	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%
IKP.1.10.3	Presentase meningkatnya apresiasi dan tenaga perfilman	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%
SP.1.11	Terselenggaranya tata kelola Setjen dan pengelolaan BMN Kementerian yang akuntabel					
IKP.1.11.1	Indeks kepuasan layanan setjen	87,00%	89,00%	91,00%	93,00%	95,00%
IKP.1.11.2	Persentase aset Kemendikbud yang telah ditetapkan status penggunaannya dan telah tersertifikasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SP.1.12	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai					
IKP.1.12.1	Jumlah aparatur Kemendikbud yang mengikuti diklat jabatan, teknis, dan fungsional	30,00%	41,00%	50,00%	60,00%	100,00%
IKP.1.12.2	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan pengembangan tenaga kependidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SP.1.13	Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan					
IKP.1.13.1	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi kebijakan	1	1	1	1	1

Perkiraan Kebutuhan Anggaran di Kemendikbud Tahun 2015 - 2019

NO	PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.887,36	3.187,04	3.537,41	3.876,75	4.243,38	18.731,95
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	212,01	223,06	234,21	245,92	258,27	1.173,47
3	Program Dikdasmen	31.347,82	37.664,01	38.747,36	39.920,94	41.132,42	188.812,55
4	Program PAUD dan Dikmas	2.589,66	4.386,08	4.616,47	4.835,61	4.830,63	21.258,45
5	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.342,79	1.602,74	1.627,76	1.627,23	1.713,94	7.914,46
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	501,23	511,25	521,48	532,25	543,24	2.609,45
7	Program Pengembangan Guru dan Tendik	11.817,83	14.390,95	15.108,33	15.788,20	16.498,67	73.603,97
8	Program Pelestarian Budaya	1.714,16	2.378,04	2.550,57	2.365,69	2.373,00	11.381,45
TOTAL		53.412,86	64.343,17	66.943,59	69.192,59	71.593,55	325.485,76

7

Evaluasi Kinerja

Kriteria Penentuan Indikator Kinerja

Pendekatan **SMART-V**, yaitu:

- **Specific**: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas
- **Measurable**: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya.
- **Achievable**: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada
- **Relevant**: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target dalam *Output* dalam rangka mencapai target *Outcome* yang ditetapkan; serta antara target dalam *Outcome* dalam rangka mencapai target *Impact* yang ditetapkan
- **Time Bond**: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan
- **Verifiable**: Dapat divalidasi/diverifikasi

Informasi **Indikator Kinerja**

1. **Nama Kegiatan/Program:** Tulis nama kegiatan/program
2. **Tujuan Kegiatan/Program:** Tulis tujuan kegiatan/program
3. **Penanggung Jwb Indikator:** Satker/Unker Pnggjwb Rumusan & laporan
4. **Nama Indikator:** Nama & Kategori Indikator (IKP/IKK)
5. **Indikator:** Jelaskan Indikator Baru atau Lama
6. **Tujuan/Kepentingan:** Jelaskan & Mengapa Penting
7. **Difinisi Operasional Indikator:** Jelaskan maksud dari operasional indikator
8. **Target Kinerja yang Diharapkan:** Identifikasi Tingkat & Arah Kinerja
9. **Metode Penghitungan:** Gambarkan Cara Menghitung
10. **Tipe Penghitungan:** kumulatif/Non Kumulatif
11. **Sumber Data :** Dari Mana Dan Bagaimana Data Dikumpulkan
12. **Waktu Pengumpulan Data Indikator:** Tanggal Berapa
13. **Pengelola Data Indikator:** Satker/Unit Kerja Pnggjwb Data
14. **Jadwal Pelaporan:** Triwulan, Semester Atau Tahunan
15. **Hambatan pengumpulan data:** untuk pengukuran kinerja

TERIMA KASIH



Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri | Kemdikbud